

### BAB III

#### CITA CITA SOSIALIS INDONESIA

##### A. Landasan Cita Cita Sosialisme Indonesia

###### a. Landasan Sosiologis

Apa yang telah diuraikan pada bab terdahulu merupakan dinamika perkembangan cita cita dan gerakan sosialisme di dunia. Dan secara global perkembangan tersebut dapat juga untuk menggambarkan **perkembangan** cita cita dan gerakan sosialisme di Indonesia. Sosialisme sebagai ajaran keadilan untuk kaum tertindas dan kaum teraniaya dibawa ke **Indonesia** oleh kaum sosialis Barat pada permulaan abad kedua puluh.

Pada masa awal pergerakan nasional berdiri satu gerakan kebangsaan yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan disusul Sarikat Islam ( SI ) pada tanggal 10 September 1912 serta Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1912. Mengikuti berdirinya organisasi organisasi tersebut, pada bulan Mei 1914 seorang Belanda yang bernama Adolf Baars dengan beberapa orang Belanda peranakan mendirikan **organisasi** baru yaitu Indische Social Democratische Vereniging ( ISDV )<sup>1</sup> Organisasi atau gerakan ISDV yang diprakarsai oleh Baars dan temannya Sneevliet pada waktu itu kurang mendapat tanggapan dari rakyat. Maka kedua tokoh tersebut mengupayakan untuk dapat berhubungan dengan tokoh Sarikat Islam yang pada saat itu sedang berkembang dengan pesatnya sebagai gerakan kebangsa-

---

<sup>1</sup>Dawam Raharjo, Intelektual Intelegensia dan Prilaku-Politik Bangsa, Mizan, Bandung, 1993, hal. 234

an yang bersifat kerakyatan.

43

Berkat kerjasama dengan tokoh dan pimpinan gerakan SI Sneevliet dengan ISDVnya mulai mendapat perhatian dan mulai memperoleh pengikut yang juga aktifis SI seperti, Semaun,- Tan Malaka, Alimin dan Darsono. Kegiatan orang orang ISDV yang memprogandakan sosialisme dengan prinsip perjuangan kelas dalam tubuh SI mulai mendapat tanggapan dari tokoh tokoh utama SI dan dinilai negatif sebab hendak memecah bangsa Indonesia.

Sebagaimana di negara negara Eropa pada umumnya, diantara orang orang ISDV timbul dua aliran sosialisme. Sebagian ada yang memihak kepada gerakan sosialisme Moskow yang bersifat sangat radikal dan sebagian yang lain mengikuti Gerakan Internasional Kedua. Sebagaimana dalam penjelasan Sjahrir bahwa Gerakan Internasional Kedua bersikap netral terhadap perang dunia pertama dan lebih mengikuti sikap negaranya masing masing. Yang kemudian ditanggapi Oleh Lenin dengan Gerakan Internasional Ketiga, untuk mengumpulkan kaum Marxis yang sejati.<sup>2</sup>

ISDV resmi pecah menjadi dua ( 1920 ), yang satu menjelma menjadi Partai Komunis Hindia dan yang satunya adalah Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP). Partai Komunis Hindia inilah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama. Sejarah PKI Lama

---

<sup>2</sup>Sutan Sjahrir, Sosialisme Indonesia Pembangunan, LEP PENAS, Jakarta, 1982, hal. 68

44

adalah sejarah gerakan sosialisme radikal dan revolusiner dalam melawan penjajah di Indonesia. Gerakan Partai Komunis Hindia atau PKI Lama secara resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda akibat pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1926. PKI Lama menjadi partai terlarang dan banyak pemimpinnya yang dibuang oleh pemerintah kolonial ke Boven-Digul, sedangkan yang sebagian lagi melarikan diri keluar negeri.

Setelah PKI Lama praktis hancur oleh penguasa kolonial, pada dasarnya dalam tubuh organisasi tersebut telah terjadi perpecahan yaitu, mereka yang setuju dengan aksi pemberontakan 1926 juga yang menerima Komunis Internasional (Komintern) dengan mereka yang menentangnya. Kelompok yang menentang aksi 1926 dan Komintern seperti Tan Malaka, Subakat dan Jamaluddin Tamin bersama-sama mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok.<sup>3</sup>

ISDP yang pada masa penjajahan masih menamakan diri sosialis tidak dapat menarik perhatian orang Indonesia karena terlalu bersifat Kebelandaan dan kolonial. Memang tujuan sebenarnya kaum ISDV dan Sneevliet serta Baars adalah menyebarkan Internasionalisme dan menentang Nasionalisme, baik Baars maupun Sneevliet adalah pengikut fanatik sosialis Lenin di Moskow. Karena hal itulah makanya tokoh-tokoh SI selalu menghalangi pengaruh gerakan ISDP.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Alfian, Tan Malaka: Pejuang Revolusiner Yang Kesepian, dalam, Taufik Abdullah, Manusia Dalam Kemelut Sejarah, LP3ES, Jakarta, cet. V, 1988, hal.153

<sup>4</sup> Dawam Rahaarjo, Op. Cit., hal. 233

95

Sesudah hancurnya Partai Komunis Hindia cita cita sosialisme diantara bangsa dan rakyat Indonesia hanya hidup dalam kandungan gerakan kebangsaan. Dalam gerakan kebangsaan serta kerakyatan yang berdasarkan keindonesiaan tumbuh cita cita kemerdekaan yang diharapkan memungkinkan pembangunan masyarakat baru. Suatu Masyarakat yang adil, aman dan makmur atas dasar kerjasama bangsa Indonesia yang telah lama menderita sebagai bangsa jajahan.

Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju ke bebasan dari penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan sendirinya terpicat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme di Barat. Hal mana juga seperti pengakuan Abu Hanifah, sebagai berikut :

Pernah berbulan bulan kami memperdebatkan revolusi Prancis. Masing masing mempunyai jagonya, Amir Sjarifudin mengagumi Roberspierre, Mohamad Yamin menjagoi Marat, Asat pengikut Danton dan Saya sendiri mengagumi Mirabeau. Kebetulan semua jago jago revolusi Prancis itu memang ada counterpartnya dalam revolusi Indonesia sendiri.<sup>5</sup>

Semua revolusi mereka kaji sampai detail, akan arti, arah maupun pengaruhnya. Mulai dari revolusi Prancis, Inggris juga revolusi Amerika bahkan revolusi Rusia dan Cina. Demikian pula gerakan Ghandhi di India, boleh dikata hampir semua revolusi di dunia telah mereka kaji.

Semua tokoh pergerakan nasional kenal dan terpengaruh gerakan sosialisme Barat, baik mereka yang belajar di Eropa

---

<sup>5</sup> Abu Hanifah, Revolusi Memakan Anak Sendiri; Tragedi-Amir Sjarifuddin, dalam, Taufik Abd. (ed.), Manusia Dalam Kemelut Sejarah, LP3ES, Jakarta, cet.V, 1988, hal. 192

46

maupun mereka yang memperdalam ilmunya di dalam negeri. Mereka rata-rata memakai teori Marx untuk meninjau keadaan Indonesia serta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Misalnya, HOS Cokroaminoto mencoba untuk mensintesis ajaran Islam dengan gerakan kemanusiaan dan perjuangan kelas pada tulisannya yang berjudul Islam dan Sosialisme. Menurutnya Islam dalam pergerakannya dirasa perlu mendasarkan diri pada dua prinsip yaitu, kebersihan tauhid dan harus bersandar pada ilmu<sup>6</sup>. Meskipun buku Cokro tersebut gagal untuk mengajak kaum terpelajar untuk menggali ajaran Islam dalam kerangka sosialisme.

Ketika Soekarno dan kawan-kawan menghadapi pengadilan kolonial Belanda karena gerakan marhaenisme dengan PNI (Partai Nasional Indonesia). Soekarno mempersiapkan pembelaannya dalam suatu naskah yang panjang lebar, berkas pembelaan tersebut terkenal dengan "Indonesia Menggugat". Dalam pembelaan di pengadilan kolonial ia secara panjang lebar mengupas pemikiran-pemikiran kaum sosialis Barat. Ia mengupas habis pandangan Pieter Jelles Troelstra, untuk menggugat kaum imperialis kapitalis di Indonesia. Juga pendapat pemikir-pemikir sosialis Barat yang mengetahui betapa sengsarannya bangsa Indonesia. Kecaman-kecaman mereka terhadap kaum imperialis dipakai oleh Soekarno untuk menyerang pihak kolonial, seakan ia menguasai betul pikiran-pikiran-

---

<sup>6</sup>HOS Cokroaminoto, Islam dan Sosialisme, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, cet.v, hal. 73 - 76

47

seperti Jean Jaures, Boeke, Huender, Van Kol, Pastor Van Lith dan lain lain?<sup>7</sup>

Dalam proses pengadilan setiap pembelaan yang disampaikan oleh Soekarno merupakan ungkapan ironi untuk penguasa juga untuk rakyat Indonesia terutama kalangan terpelajar. Atas apa yang boleh dikerjakan oleh kaum sosialis Belanda di Nederland dan tidak boleh dilakukan di koloni Hindia.

Sebagaimana juga dapat kita ketahui bahwa perjuangan rakyat semesta dengan gerilya yang digelorakan oleh Panglima Soedirman diilhami oleh perjuangan revolusi proletar di Rusia. Semangat dan cita cita perjuangan kaum proletar tersebut dia terapkan untuk menggugah rakyat untuk turut aktif berjuang secara bersama bahu membahu guna menghalau musuh bangsa. Ketika ia masih mengajar di HIS Muhammadiyah ia mengobarkan revolusi dengan mengisahkan perjuangan heroik pejuang Islam dan peristiwa peristiwa penting dalam revolusi Prancis.<sup>8</sup>

Bahkan Tan Malaka secara terang terangan memakai teori dialektika marxis sebagai landasan perjuangannya. Yang kemudian dia kembangkan secara luas teori tersebut pada buku MADILOG. Demikian besar pengaruh pikiran pikiran Barat dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari kacamata sejarah mungkin tidak ada satupun tokoh perjuang-

---

<sup>7</sup> Soekarno, Indonesia Menggugat, Haji Masagung, Jakarta, 1989, cet. III, hal. 170

<sup>8</sup> Nugroho Notosusanto, Soedirman; Panglima Yang Menepati Janjinya, dalam, Taufik Abdullah (ed.), Manusia Dalam

48

an dan pendiri negara Republik Indonesia yang tidak kenaldengan pemikiran sosialis Barat.

Dalam gerakan sosialis Indonesia pengaruh agama merupakan unsur yang paling dominan. Sosialisme Indonesia lahir atas suruhan agama, karena etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesama dalam pergaulan hidup. Melaksanakan bayangan kerajaan Tuhan di atas dunia adalah tujuannya, perasaan keadilan atas sesama yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat. Terhadap keadaan yang tidak sama dan perbedaan yang menyolok mata antara si kaya dan si miskin, menimbulkan hasrat terhadap berbagai konsep tentang sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia hidup dalam kasih sayang, dalam suasana persaudaraan, tolong menolong dan bersikap adil.

Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai nilai agama, terlepas dari marxisme. Yang ada hanyalah perjumpaan cita cita sosial demokrat Barat dengan sosialisme religius ( Islam ), di mana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Sosialisme memang tidak harus merupakan marxisme, tetapi sosialisme merupakan tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang, memberikan kebebasan yang merata bebas dari segala tindasan.

Sebagian besar pemimpin pergerakan kemerdekaan dan-

49

pendiri Republik Indonesia meyakini bahwa Islam bukanlah agama yang hanya berbicara masalah masalah spiritual semata, sebagaimana dipahami secara keliru oleh sementara manusia. Yang berpendapat bahwa Islam terbatas pada persoalan-tentang jalinan hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Tuhannya. Tanpa mengambil bagian dalam persoalan tentang penyelenggaraan urusan kemasyarakatan serta aturan-aturan tingkah lakunya. Yang benar adalah Islam berciri universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tetapi juga meletakkan peraturan-peraturan dasar mengenai hubungan manusia dengan sesamanya dan kepentingan-kepentingan mereka secara umum dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia.

Revolusi Indonesia sejalan benar dengan prespektif sejarah Islam. Islam apabila jiwanya dipahami dengan benar maka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang bersifat sementara. Baik feodalisme ataupun kapitalisme tidak dapat beranggapan bahwa revolusi itu merupakan miliknya.

Islam menampilkan kepada dunia suatu pandangan yang benar tentang harga diri manusia yang mengutuk paham rasial nasionalisme yang berlebihan dan eksploitasi manusia oleh sesama manusia. Ajaran Islam yang fundamental tentang persamaan hak di bidang politik dan sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi segala zaman.

Pada masa kita, masa transpormasi sosial yang menentukan. Kaum muslimin dituntut untuk meninggalkan sama sekali feodalisme, depotisme dan setiap paham yang merusak dan



tidak cocok dengan kondisi masa kini?<sup>9</sup>

50

Berbeda dengan banyak agama lain yang lebih tua, Islam tidak saja bertujuan melakukan perubahan total di bidang pemukiman tetapi juga melakukan revolusi total dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi para penganutnya. Di sini penulis mencoba memaparkan bagian bagian penting dari perubahan secara garis besar.

Anggota anggota masyarakat manusia tidak dapat dianggap bebas dari ketergantungan di antara sesamanya. Yang benar, bahwa sebagai konsekwensi keberadaan mereka di dunia ini mereka saling memberikan pelayanan sesamanya dengan bekerjasama untuk menutupi kebutuhan masing masing.

Keterikatan ini menurut Islam merupakan persaudaraan agamis di antara sesama muslim. Dalam hubungan persaudaraan itu hak hak dan kewajiban kewajiban sosial dilaksanakan dalam bentuknya yang paling sempurna. Persaudaraan inilah merupakan faktor paling kuat dalam rangka menciptakan suasana paling harmonis, simpatik dan penuh kegotongroyongan. Dan dengan kesadaran akan arti pentingnya persaudaraan itu masyarakat akan bergerak maju menuju kepada kebaikan dan menjauhkan segala yang buruk.<sup>10</sup>

Islam mengajarkan untuk menciptakan persaudaraan di antara kaum muslim secara utuh:

---

<sup>9</sup>John J Donohue - L Esposito, Islam dan Pembaharuan, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal. 228

<sup>10</sup>Ibid., hal. 168

51  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ < الْحَجَرَاتُ ١٠ >

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.<sup>11</sup>

Langkah revolusiner lainnya dalam proses pembentukan masyarakat tanpa kelas, adalah penghapusan lembaga keagamaan sebagai kelas penguasa. Peniadaan golongan elite baik politik, sosial maupun ekonomi dengan memakai satu standard tunggal yaitu "Takwa".

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ < الْحَجَرَاتُ ١١ >

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>12</sup>

Islam mendorong pula terhadap aktifitas yang menghasilkan benda-benda material dan mencela terhadap pemborosannya. Untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan di dunia dalam rangka mengejar ultimate goal yakni akhirat. Tetapi dalam hal ini pemilikannya tidaklah mutlak, sebagian daripadanya dengan prosentase tertentu harus diserahkan kepada ne

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Yamanu, Jakarta, 1971, hal. 846

<sup>12</sup>Ibid., hal. 847

gara untuk selanjutnya dinikmati oleh fakir miskin. Yang karena sesuatu hal mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan mereka.

Islam menyatakan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan perbedaan yang menimbulkan klas klas kaya dan miskin, dengan kesenjangan sosial yang tidak terjembatani. Serangkaian upaya harus dilakukan untuk menyeimbangkan dengan cara cara yang diyakini oleh rakyat yang bersifat moral dan spiritual. Prinsip prinsip yang dikemukakan dalam Alquran menyatakan bahwa kehidupan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar kekayaan tidak berada pada kalangan tertentu.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ خَيْرٌ مِنْهُ  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ < التوبة ٢٠ >

Sesungguhnya zakat zakat itu, hanyalah untuk orang orang fakir, orang orang miskin, pengurus pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang ditetapkan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>13</sup>

Ajaran ajaran dan semangat yang sangat sosialisitistis itu tertanam kuat dalam keyakinan pendiri negara dan seluruh bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya menjadi dasar untuk bernegara, yang terwujud dalam sila pertama dari Pancasila-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme, men-

<sup>13</sup>Ibid., hal. 288

53

cari sumber sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala tindasan. Sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional yang bersumber dalam lubuk hati yang asli, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial.

Sejarah telah memberikan bukti tentang kehidupan orang orang Indonesia asli di desa desa. Dimana warga desa mengadakan satu kesatuan hukum yang dibentuk atas dasar golongan golongan penduduk yang mempunyai kepentingan bersama. Dengan kekuasaan tertinggi dari kesatuan kesatuan hukum itu ada di tangan rapat desa sebagai persidangan dari semua warga desa yang dilakukan secara demokratis.<sup>14</sup>

Segala keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Sementara Kepala Desa bukan merupakan seorang otokrat, melainkan sebagai pamong atau pimpinan yang dipilih rakyat secara demokratis. Oleh karena itu hukum di desa tersebut sebagian besar tidak tertulis (konvensi, hukum adat). Sebagai hukum asli di desa, yang mengatur cara bermasyarakat juga pemerintahannya untuk keperluan bersama.

Kesatuan masyarakat dan pemerintah desa itu didasarkan atas tiga macam ikatan :

1. Ikatan antara manusia dengan Tuhan
2. Ikatan manusia dengan manusia

---

<sup>14</sup> Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila, Ekonomi Pancasila, Mutiara, Jakarta, 1982, cet. II, hal. 13

3. Ikatan manusia dengan alam.<sup>15</sup>

Oleh karena itu warga desa merasakan sebagai bagian dari masyarakat desanya. Sehingga masyarakat desa itu bertitik-berat pada kesatuan sosial dengan semangat Ketuhanan.

Adapun keadilan menurut pengertian di desa ialah ber-sumber kepada cara hidup yang berdasar pada sikap saling tenggang rasa dan dipakai sebagai dasar hukum masyarakat dan hukum pemerintahan. Ungkapan sama rata sama rasa, bukan hanya semboyan kosong, melainkan sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pergaulan sehari hari. Sedangkan pemerint-ah yang ada berkewajiban untuk dapat menciptakan keadilan baik keadilan distributif, keadilan legal maupun keadilan komutatif.<sup>16</sup>

Involusi pertanian dan kemiskinan bersama adalah dua hal yang ditengarai oleh Clifford Geertz dalam menjelaskan sejarah perekonomian asli Jawa. Dengan gejala gejala yang timbul, pertama sifat pasca tradisional dari struktur desa kedua, semakin kuatnya sistem komunal, ketiga adalah peng-embangan produksi palawija dan keempat, semakin parahny- kemiskinan.<sup>17</sup>

Penelitian Geertz tersebut dilakukan di desa desa Ja wa dengan perkebunan tebu. Ia melihat dalam penggarapan sa wah dengan model tradisional, benar benar terlepas dari ke

---

<sup>15</sup>Log. Cit.

<sup>16</sup>Sunoto, Menuju Filsafat Indonesia, Hadinata, Yogya karta, 1987, hal. 84 - 88

<sup>17</sup>Hiroyoshi Kano, Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesa-an Jawa, dalam, Akira Nagazumi, Indonesia Dalam Kajian Sar jana Jepang, Yayasan Obor, Jakarta, 1986, hal. 18

55

serakahan kapitalis. Sebagaimana yang diterangkan oleh Geertz yang dikutip Kano :

Di bawah tekanan jumlah penduduk yang makin banyak dan sumber sumber daya yang terbatas, masyarakat pedesaan Jawa tidak terbagi menjadi dua golongan yaitu, golongan tuan tanah besar dan golongan setengan budak yang tertindas-sebagaimana halnya pada begitu banyak negara berkembang lainnya. Tetapi sebaliknya, masyarakat ini mempertahankan suatu tingkat homogenitas sosialisme yang cukup tinggi dengan membagi kue ekonomi dalam potongan-potongan yang makin lama makin kecil, suatu proses yang bagian lain saya sebut "kemiskinan bersama" ...<sup>18</sup>

Dalam masyarakat Indonesia asli tidak ada pemisahan yang tegas antara apa yang dikatakan hukum publik dan hukum private. Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat dunia Barat yang berdasarkan individualisme. Hukum adat yang ada pada masyarakat Indonesia dapat dimengerti apabila orang selalu memperhatikan sifat perkauman yang kuat dalam pergaulan hidup sehari hari.

Sifat perkauman itu pada pelaksanaan hukum tidak saja terletak dalam hak hak yang aneh yang diperoleh pemerintah desa atas dasar hak ulayat desa, seperti intervensi pemerintah desa dalam menjual dan menggadaikan tanah. Meminta untuk penyerahan tanah selama kurun waktu yang tidak ditentukan untuk kepentingan desa. Sifat perkauman itu adalah pula karena segala hukum harus dipahami dari jurusan selain hak individu seperti hukum di Roma, melainkan kepentingan pergaulan hidup bersama menguasai pemakaian barang kepunyaan sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 19

<sup>19</sup> Mohammad Hatta, Beberapa Pokok Pikiran, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 146

56

Demikianlah timbulnya cita cita untuk menyusun sosialisme dari bawah dengan bersendikan bangunan bangunan koperasi. Yang akan meliputi seluruh bidang ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi dan seluruh aspek ekonomi lainnya. Jalan menuju ke arah sana lebih mudah karena gerakan kapitalisme muda Indonesia terhalang oleh imperialisme.<sup>20</sup>

b. Landasan Konstitusional.

Menurut arahnya dasar perekonomian dimasa datang akan semakin jauh dari dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektifisme. Memang kolektifismelah yang sesuai dengan cita cita hidup bangsa Indonesia. Sudah dari dulu kala masyarakat Indonesia juga masyarakat Asia lainnya berdasarkan kepada kolektifisme.

Pembangunan ekonomi Indonesia sesudah kemerdekaan haruslah didasarkan kepada cita cita yang telah tumbuh lama di bumi pertiwi ini. Sudah barang tentu pada tingkatan dan derajat yang lebih tinggi dan teratur dengan mempegunakan jangkauan ke depan yang lebih baik. Ada tiga soal menurut Hatta yang berkaitan dengan pembangunan tata perekonomian Indonesia yang kita hadapi.

1. Soal ideologi, bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita cita tolong menolong.
2. Soal praktek, politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera dimasa yang akan datang.
3. Soal koordinasi, bagaimanakah mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid., hal. 149

<sup>21</sup>Mohammad Hatta, Beberapa Pokok Pikiran UI Press-Press, Jakarta, 1987, cet. II, Hal. 44

57

Dasar politik perekonomian Indonesia terpancang dalam Undang Undang Dasar 1945 pada bab kesejahteraan sosial pasal 33, sebagai berikut :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.<sup>22</sup>

Usaha bersama dapat dilihat dari sudut ekonomi makro maupun dari sudut ekonomi mikro. Kedua sudut pandang tersebut mempunyai implikasi sama sama berusaha bagi semua unsur yang terlibat didalam usaha bersama tersebut. Dari sudut pengertian sistem, masing masing unsur mungkin menjalankan kegiatan atau fungsi yang berbeda beda tapi saling melengkapi dalam rangka tujuan yang sama. Yang lazim dikatakan kepentingan bersama atau kebaikan bersama ataupun kesejahteraan bersama.

Karena itulah dalam perekonomian nasional dan badan badan usaha, kita kenal berbagai sektor atau bidang dan fungsi yang interpedensi yang seluruhnya harus berjalan dalam rangka tujuan bersamanya. Jadi dalam pengertian makro usaha bersama adalah sistem perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dalam hubungan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap sistem perekonomian adalah suatu usaha ber

---

<sup>22</sup> Sekretariat Negara RI, Undang Undang Dasar 1945, - Mutiara Sakti Utama, Jakarta, 1985, hal. 8



58

sama. Sekalipun mungkin ada perbedaan besar atau kecil dalam nilai, sikap dasar, otoritas, kepemimpinan serta struktur kekuasaan yang mengaturnya. Dalam sistem liberal kapitalis, usaha bersama itu berpangkal pada pengakuan akan kebebasan mutlak setiap individu dan penerimaan segala konsekuensi atas pribadi masing masing. Sehingga terbentuk pada kontradiksi intern dan melahirkan free enterprise, free fight yang mungkin akan mengarah pada exploitation de l'homme par l'homme. Sebaliknya dalam sistem kolektifisme murni, usaha bersama dilakukan di bawah paksaan penguasa mutlak yang mengarah pada sistem killing ground.<sup>23</sup>

Usaha bersama dalam pengertian ekonomi mikro adalah badan badan usaha, yang di Indonesia banyak dikenal misalnya, CV, PT, Firma, BUMN dan sebagainya. Harus merupakan badan usaha yang diletakkan pada bangun perusahaan yang diharapkan dan sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan UUD 1945; "...sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi ...".<sup>24</sup>

Mohammad Hatta dalam banyak kesempatan dan tulisan menyatakan bahwa perkataan koperasi memang tidak disebut langsung dalam pasal 33, akan tetapi asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945, Hatta

---

<sup>23</sup>Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1993, cet. V, hal. 109

<sup>24</sup>Sekretariat Negara RI, Op. Cit., hal. 20

menjelaskan bahwa istilah "asas kekeluargaan" itu diambil dari Taman Siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan murid yang tinggal dan hidup sebagai suatu keluarga. Bila asas itu diangkat ke dalam koperasi maka hubungan antara anggota koperasi harus mencerminkan hubungan orang yang bersaudara. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Para anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualitas, insyaf akan harga dirinya.<sup>25</sup>

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi-ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindari sistem negatif, sebagai berikut :

1. Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi manusia atas sesama dan bangsa lain, yang dalam sejarah Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam negara serta perangkat atau pelaku ekonomi negara yang bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk oligopoli dan monopoli yang merugikan masyarakat.<sup>26</sup>

Sebab itu maka cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak harus dikuasai

---

<sup>25</sup>Mohammad Hatta, Op. Cit., hal. 224

<sup>26</sup>BP7 Jawa Timur, Himpunan Ketetapan Ketetapan MPR RI Tahun 1988, hal. 28

60  
oleh negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat orang banyak yang boleh dikuasai oleh pemerintah.

Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks pelaksanaan hak menguasai oleh negara, hak dan kewajiban negara sebagai berikut :

1. Pemilik
2. Pengatur
3. Perencana
4. Pelaksana
5. Pengawas.<sup>27</sup>

Kelima pokok di atas dengan kapasitas yang berbeda dapat menempatkan negara dalam kedudukannya untuk menguasai lingkungan alam. Sehingga hak menguasai bisa dilakukan dengan memiliki sumber daya alam maupun dengan tidak memiliki sumber daya alam. Namun mengimplementasikan hak menguasai melalui jalur pengaturan, perencanaan dan pengawasan.

Pasal 27 ayat (2), "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>28</sup> Merupakan legalitas bagi warga negara untuk memperoleh hak yang paling asasi sebagai makhluk hidup. Juga merupakan landasan serta penegasan bahwa bangsa Indonesia menolak dan menentang sistem *laissez faire* dan *exploitation de l'homme par l'homme*.

---

<sup>27</sup> Emil Salim, Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi - Pancasila, dalam Sri Edi S.(ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, UI Press, Jakarta, cet. II, 1987, hal. 61

<sup>28</sup> Sekretariat Negara RI, Op. Cit., hal.6

61

Sedangkan pasal 34 menerangkan tentang tanggung jawab negara atas warga negara yang kurang beruntung hidupnya "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".<sup>29</sup> Melihat pasal tersebut maka jelas sudah tugas dan tanggung jawab negara atas kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang terlantar. Kesemua pasal-pasal di atas tidak lain dan tidak bukan mempertegas adanya orientasi sosialisme di Indonesia.

Ketetapan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah suruhan normatif yang berakar pada pandangan hidup bangsa. Peraturan-peraturan itu tidak dapat ditawar-tawar lagi, harus dilaksanakan oleh setiap insan yang mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan dengan ketentuan-Undang-Undang Dasar 1945, maka terdapatlah pegangan untuk merealisasikan apa yang dahulu dikandung sebagai cita-cita sosialisme.

#### B. Cita-cita Sosialisme Orde Lama

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 semua yang ada di koloni mengalami perubahan, dengan tercapainya tujuan perjuangan untuk berbangsa dan bernegara sendiri. Lahirlah masalah baru yaitu bagaimana mengatur bangsa dan negara Republik Indonesia. Timbul pula suatu keharusan untuk memperjuangkan sosialisme bagi sekalian orang yang bercita-cita sosialisme supaya dijadikan pedoman dalam mendirikan dan membangun negara Indonesia. Hal mana terealisasikan dalam ke-

---

<sup>29</sup> Sekretariat Negara RI, Op. Cit., hal. 8

62

bijakan politik MANIPOL / USDEK yang memperbolehkan kegiatan partai partai sosialis pada pemerintah Orde Lama. Seperti kita ketahui pada masa Orde Lama parpol parpol yang turut meramaikan panggung politik nasional hampir semua dari partai yang ada condong kepada sosialisme.

Keberadaan partai partai sosialis pada tahun tahun permulaan revolusi kebangsaan semua aliran dan cita cita sosialis perlu mempersatukan tenaga dan pikiran guna mendorong pelaksanaan revolusi tersebut. Akan tetapi pada tahun tahun itu pula telah kelihatan bahwa antara kaum yang menamakan dirinya sosialis itu terdapat berbagai aliran. Hal mana diakui secara tegas oleh pemerintah Orde Lama yakni dalam pidato jawaban pemerintah kepada BP KNP (Badan Pelaksana Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tahun 1948. Bahwa memang terdapat aliran aliran politik yang berlainan yaitu komunisme yang berkiblat kepada politik Soviet Rusia dan nasionalisme Indonesia.<sup>30</sup>

Pada masa peralihan saat itu dapat dimaklumi, memang sulit sekali untuk melepaskan diri dari kungkungan kapitalisme internasional. Kapitalisme internasional itu tidak dapat dilawan dengan semboyan atau dengan memihak kepada Soviet Rusia. Dengan kebebasan yang meliputi seluruh tanah tumpah darah Indonesia bukan berarti Indonesia akan terlepas dari belitan kapitalisme internasional. Banyak perangkat dan sistem yang harus dibenahi, terutama political wil

---

<sup>30</sup> Mohammad Hatta, Op. Cit., hal. 62

63

yang mendukung ke arah terciptanya keadilan sosial, demikian peringatan BP KNP kepada pemerintah Orde Lama.<sup>31</sup>

Penyesalan dan kekecewaan BP KNP juga masyarakat atas keterlambatan jalannya pembangunan di semua sektor, segera mendapat tanggapan dari pusat. Perasaan tidak puas atas hasil yang dicapai dan kecemasan atas memurunnya keadaan politik dan ekonomi negara menimbulkan rangkaian usaha yang ditempuh oleh Presiden Soekarno. Dan mulailah dilancarkan Konsepsi Presiden tentang pembangunan, kemudian diikuti dengan gagasan Demokrasi Terpimpin.<sup>32</sup>

Dalam pidato kenegaraan Soekarno dengan lantang mengajak bangsa Indonesia untuk siap menyongsong fase sosial ekonomis daripada Revolusi Indonesia. Yang merupakan fase investment meliputi investment of human skill, material investment dan mental investment. Fase investment itu hanya dapat dilakukan dalam satu suasana politik yang cocok dan favourable yaitu Demokrasi terpimpin.<sup>33</sup>

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala bidang kenegaraan dan kemasyarakatan, yang meliputi bidang ; politik, ekonomi dan sosial. Demokrasi terpimpin adalah alat untuk mencapai tujuan revolusi yakni alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual.

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 60

<sup>32</sup> Presiden Soekarno, Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat, Persahabata, Surabaya, 1965, hal. 1965

<sup>33</sup> Doktrin Revolusi Indonesia, Persahabatan, Surabaya 1965, hal. 158

64

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Perancang Pembangunan Nasional ( DEPERNAS ) untuk membantu Dewan Menteri; a. mempersiapkan Rancangan Undang Undang pembangunan Nasional Berencana, b. menilai pelaksanaan pembangunan tersebut berdasar pasal 2 UU no 80 tahun 1959.<sup>34</sup> Ditegaskan pula oleh Presiden dalam Amanatnya pada tanggal 17 Agustus 1959, yang dikenal sebagai Manifesto Politik Soekarno bahwa tugas DEPERNAS adalah untuk merancang pola pembangunan masyarakat adil dan makmur atau masyarakat sosialisme Indonesia. Sebagaimana yang dimaksudkan dari Mukadimah UUD 1945 dan pasal 33 dari UUD 1945.<sup>35</sup>

Rencana pembangunan tahap I DEPERNAS memang berisikan Tripola yaitu, Pola Proyek, Pola Penjelasan dan Pola Pembiayaan pembangunan. Dengan meletakkan dasar dasar bagi dua rangkaian kesatuan pembangunan yakni, pembangunan material dan spiritual. Serta pembangunan tata ekonomi nasional yang sanggup mandiri dengan tidak bergantung kepada pasang surutnya perekonomian dunia.

Syarat utama untuk pembangunan rohaniah yang kokoh adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong royong. Sebagaimana dijelaskan dalam dasar negara Pancasila yang mengutamakan-

---

<sup>34</sup>S Surjo Untoro, Ensiklopedia Sosialisme, Ksatria - Surabaya, 1963, hal. 19

<sup>35</sup>Doktrin Revolusi Indonesia, Op. Cit., hal. 120

65

kesadaran hidup yang berwaja dengan kejujuran yang sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat ajaran pokok untuk pembangunan tata perekonomian nasional adalah antara lain, pembebasan berjuta juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan undang undang pertanahan (landreform) menurut ketentuan hukum Indonesia. Dengan meletakkan dasar dasar bagi industrialisasi terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara.<sup>36</sup>

Tujuan dari pembangunan nasional semesta berencana adalah sosialisme Indonesia yaitu, tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme seperti yang diartikan oleh negara negara Barat atau oleh negara negara sosialis asing. Tetapi sosialisme Indonesia berisi perpaduan yang serasi dari unsur unsur sosialisme yaitu, keadilan sosial dan kesejahteraan, dan unsur unsur Indonesia seperti tergambar dalam asas gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan ciri pokok dari kepribadian Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam melaksanakan keadilan sosial dan kesejahteraan dengan berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan dengan tujuan yang dikejar dan yang akan dilaksanakan adalah kesejahteraan bersama dimana terdapat kemakmuran materiil spi-

---

<sup>36</sup>Ruslan Abdulgani, Sosialisme Indonesia, Prapanca, - Jakarta, cet. VII, 1965, hal. 55

<sup>37</sup>Doktrin Revolusi Indonesia, Op. Cit., hal. 514



CG

ritual dalam bentuk kekayaan umum. Kekayaan badaniah dan rohaniyah yang melimpah ruah serta pembagiannya yang merata sesuai dengan sifat perbedaan masing masing warga dalam keluarga bangsa.

Dasar pengertian sosialisme Indonesia yang dipakai adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh DEPERNAS :

Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan gerakan tentang tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah tuntutan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia.<sup>38</sup>

DEPERNAS selain telah merumuskan dasar pengertian sosialisme Indonesia juga merumuskan gambaran tentang manusia, masyarakat, politik dan ekonomi sosialisme Indonesia. Gambaran manusia sosialis Indonesia :

Cita cita tentang manusia sosialis Indonesia berisi gambaran tentang manusia yang mendasarkan cipta, rasa, karya dan karyanya atas landasan landasan sebagai berikut:

- a. Kepribadian dan kebudayaan Indonesia
- b. Semangat patriot komplit
- c. Azas Pancasila
- d. Semangat gotong royong
- e. Jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta)
- f. Susila dan budi luhur
- g. Kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran
- h. Kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak.
- i. Kesadaran Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
- j. Kerelaan berkorban dan hidup hemat
- k. Azas Demokrasi Terpimpin
- l. Azas Ekonomi Terpimpin
- m. Disiplin
- n. Kepandaian untuk menghargai waktu
- o. Cara berfikir rasionil dan ekonomis
- p. Kesadaran bekerja untuk membangun dengan kerja keras.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Log. Cit.

<sup>39</sup> Ibid., hal. 517

Gambaran tentang masyarakat sosialis Indonesia adalah : <sup>67</sup>

Cita cita tentang masyarakat sosialis Indonesia menggambarkan suatu masyarakat yang tertib, aman, tentram dan sejahtera, dimana orang-orangnya ramah tamah, berjiwa kekeluargaan dan bersemangat gotong royong serta berkesadaran bekerja.<sup>40</sup>

Sedangkan Politik sosialis Indonesia adalah :

Cita cita tentang politik sosialis Indonesia berisi gambaran tentang negara yang bersatu padu dan sejahtera rakyat dan pemerintahnya, karena pemerintahnya adalah pemerintah nasional dan yang panjang luas kemasyhuran dan tinggi unggul martabat serta kewibawaannya.<sup>41</sup>

Dan cita cita sosialisme Indonesia digambarkan sebagai :

Suatu tata perekonomian, yang disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>42</sup>

Begitu jelas dan gamblang cita-cita sosialisme pada masa Orde Lama, dengan menggunakan Amanat Penderitaan Rakyat sebagai mythosnya, pengertian-pengertian dan sistimatisnya adalah logosnya dan keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan dalam Pancasila ethosnya.

### C. Cita-cita Sosialisme Orde Baru

Ditinjau dari konteks manapun, runtuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru tetap merupakan persoalan yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang relevan untuk ditinjau dalam hal ini adalah dampak perubahan

---

<sup>40</sup>Ibid., hal. 519

<sup>41</sup>Ibid., hal. 517

<sup>42</sup>Ibid., hal. 518

68  
pemikiran ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan Indonesia sebagai akibat lahirnya Orde Baru.

Sebagaimana diketahui lahirnya Orde Baru telah menimbulkan dampak psikologis yang kuat di kalangan Kaum Menengah Kota, umumnya masyarakat terdidik, umat Islam dan para mahasiswa. Secara sederhana dampak psikologis itu ditandai oleh timbulnya rasa optimisme yang meluap luap akan kebebasan dan demokrasi yang selama Orde Lama ditekan oleh mitos revolusi.<sup>43</sup>

Terjadinya berbagai krisis politik sejak zaman Demokrasi Parlementer (Liberal) sampai zaman Demokrasi Terpimpin telah menyebabkan berbagai persoalan pembangunan. Runtuhnya ekonomi Indonesia, rusaknya sarana transportasi, industrialisasi yang mundur telah menyebabkan meluasnya krisis krisis ekonomi, sosial dan politik. Timbulnya berbagai konflik politik, polarisasi politik yang meluas serta pada puncaknya melahirkan Gerakan 30 September 1965 merupakan masalah masalah besar yang harus dipikul oleh rakyat Indonesia.

Sejak tumbanganya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru telah terjadi perubahan perubahan pemikiran yang radikal pada masyarakat Indonesia. Perubahan pemikiran itu terutama berkembang di kalangan masyarakat menengah kota. Baik karena hak hak demokrasiya tertekan dimasa Orde Lama maupun karena kesadaran politiknya mulai tumbuh di masyarakat

---

<sup>43</sup>Fachry Ali-Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan, Bandung, 1986, hal. 93

luas. Tetapi peristiwa peristiwa yang langsung mempengaruhi ide pembangunan Orde Baru adalah reaksi intelektual atas terlaksananya kebijakan Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Soekarno. Karena Demokrasi Terpimpin dinilai tidak realistis, membahayakan negara dan menimbulkan keinginan kelompok kelompok tertentu.

Pergolakan pergolakan ideologi politik Orde Lama pada akhirnya seringkali menciptakan ketidakstabilan kehidupan nasional, oleh pemerintah Orde Baru diupayakan benar benar agar tidak terulang kembali. Untuk itu Trilogi pembangunan yang dicanangkan berkisar pada stabilitas nasional pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.<sup>44</sup> Langkah langkah yang diambil pemerintah Orde Baru sehubungan dengan kebijaksanaan umum yang terangkum dalam Trilogi Pembangunan segera nampak. Dengan munculnya gagasan pembangunan lima tahun (PELITA) yang dimulai sejak tahun 1969, merupakan langkah besar yang dimaksudkan untuk merealisasikan program pembangunan nasional secara bertahap.

Orde Baru, betapapun dalam banyak hal terdapat perbedaan dengan orde Lama namun menurut Nurcholis haruslah tetap dipandang sebagai kelanjutan langsung masa sebelumnya. Orde Baru lahir adalah karena pengalaman pengalaman Orde Lama dan Orde Baru memanfaatkan pengalaman pengalaman itu untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan untuk

---

<sup>44</sup>Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan III 1977-1981, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hal. 130

mewujudkan keadilan sosial.<sup>45</sup>

70

Ketika pemerintah Orde Baru memulai peranannya dalam pentas politik di Indonesia, Orde Baru memulai dengan pencaangan program pembangunan dengan mengamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun rencana pembangunan Indonesia. Pokok gagasan dalam menyusun perencanaan pembangunan lima tahunan, secara konstitusional tersusun dalam tahun 1968 dan dapat dimulai pada tahun 1969.<sup>46</sup> Jika dilihat dari program yang dicanangkan juga sasaran yang ingin dicapai, kelihatan sekali bahwa Orde Baru bersifat sosialis.

Berdasarkan Garis Besar Haluan Negara tujuan dilaksanakannya Pelita pelita adalah, pertama meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Kedua meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan selanjutnya pada Trilogi Pembangunan. Dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.<sup>47</sup> Asas pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial itu dituangkan dalam program 8 (delapan) jalur pemerataan, antara lain sebagai berikut :

- (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan.
- (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pe-

---

<sup>45</sup>Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1993, cet. V, hal. 36

<sup>46</sup>Presiden Soeharto, Op. Cit., hal. 43

<sup>47</sup>Ibid., hal. 55

- layanan kesehatan 7)
- (3) Pemerataan pembagian pendapatan
  - (4) Pemerataan kesempatan kerja
  - (5) Pemerataan kesempatan berusaha
  - (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan kaum wanita
  - (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
  - (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.<sup>48</sup>

Dalam cakrawala pandangan yang lebih luas pembangunan Indonesia dituntun dengan kerangka asas pembangunan nasional. Asas-asas Pembangunan Nasional ditetapkan oleh MPR No. IV/MPR/1978 yang ditegaskan lagi dalam ketetapan No. II /MPR/1988 pada Bab II point C, tentang asas-asas pembangunan nasional :

1. Asas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan-pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat dan bagi pengembangan pribadi Warga Negara.
2. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
3. Asas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial dan ekonomi serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma bhaktinya yang diberikannya kepada Bangsa dan Negara.
5. Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara-kepentingan duniawi dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara serta antara kepentingan nasional dan internasional.

---

<sup>48</sup> Ibid., hal. 55

- 72
6. Asas Kesadaran Hukum, ialah bahwa tiap Warga Negara-Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin-kepastian hukum.
  7. Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri, yaitu bahwa Pembangunan Nasional harus berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta ber-sendikan kepada kepribadian bangsa.<sup>49</sup>

Dalam pidatonya di depan Sidang DPR RI tanggal 16 Agustus 1981, Presiden Soeharto antara lain berkata bahwa de-wasa ini, keadilan sosial yang dicita citakan memang belum terwujud. Tetapi kita juga tidak dapat memungkiri kenyata-an bahwa kesejahteraan rakyat rata rata dewasa ini jauh le-bih baik dari waktu waktu sebelum pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa :

Dari hasil pembangunan serta dari arah kebijaksanaan pembangunan yang dilandaskan kepada GBHN, kita akan ber-gerak menuju terwujudnya keadilan sosial. Kita dengan sadar dan secara pragmatis melaksanakan demokrasi ekono-mi seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah usaha untuk-meletakkan landasan yang kuat agar kita mampu terus tum-buh dan bersamaan dengan itu kita usahakan agar kesejah-teraan rakyat tadi bertambah baik, hingga akhirnya ter-wujudlah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>BP 7 Propinsi Daerah Tingkat I JAWA TIMUR, Himpun-an Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repu-blik Indonesia Tahun 1988, 1988, hal. 19-20

<sup>50</sup>Presiden Soeharto, Op. Cit., hal. 173